

Judul : Usut Sumber Gagal Ginjal
Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Usut Sumber Gagal Ginjal

Komisi IX DPR membuka kemungkinan mengambil hak interpelasi terkait munculnya kembali kasus GGAPA yang menewaskan anak usia 1 tahun di Jakarta.

EMIR CHAIRULLAH
emir@mediaindonesia.com

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah akan mengusut sumber penyebab munculnya kembali kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada awal bulan ini. Selain itu, Wapres meminta Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memperketat pengawasan peredaran obat.

"Kita sudah minta Kementerian Kesehatan dan Badan POM terus melakukan pengawasan dan penertiban. Selain obat, kalau bukan obat sirup, cari lagi sumbernya sampai ketemu," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kemarin.

Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan, penyelidikan kasus ini memerlukan waktu dan investigasi mendalam hingga akhirnya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat. Selama masa penyelidikan ini, Kemenkes diminta untuk

proaktif memberikan bantuan moril dan semangat kepada keluarga korban sebagai bentuk empati pemerintah atas apa yang terjadi.

"Kita minta Kementerian Kesehatan untuk menyantuni orang-orang yang terkena itu. Supaya mereka (Kemenkes) datang dan memberikan semangat kepada mereka, (untuk) menyantuni orang-orang yang terkena penyakit itu, korban-korban itu," imbuhnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan akan dilakukan juga investigasi lebih lanjut terhadap makanan pendamping air susu ibu (MPASI) yang dikonsumsi anak korban meninggal GGAPA.

"Kalau dari riwayatnya kan anak usia 1 tahun, selain minum obat sirup, dia juga ada MPASI, tapi masih perlu dikaji lebih luas lagi," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Makanan pendamping yang dimaksud Kemenkes ini merupakan bubur bayi kemasan jadi dengan tekstur seperti tepung yang dicampur air bisa

Desakan KPAI Terkait Hak Keluarga Pasien GGAPA

- Agar negara segera bertanggung jawab atas hilangnya hak ralsuan korban akibat kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA).
- Ada kebijakan terkait kejadian luar biasa (KLB).
- Mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera memonitor serta mengevaluasi kebijakan dan penanganan di lapangan.

Desakan Komisi IX DPR RI

- Segera tetapkan kasus GGAPA sebagai KLB.
- Mendesak Kemenkes untuk menyelesaikan kasus GGAPA pada anak Indonesia dengan segera menuntaskan investigasi berbasis epidemiologis.
- Meminta pemerintah bertanggung jawab atas dampak kerugian materiel maupun imateriel yang ditanggung oleh para keluarga korban.
- Bila keputusan rapat tidak dilakukan, DPR mempertimbangkan akan mengajukan interpelasi.

Perkembangan Dugaan Penyebab GGAPA

- Pemerintah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan obat dan makanan yang dikonsumsi korban.
- Salah satu objek uji ialah obat sirup dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) seperti bubur bayi kemasan.

Temuan Kasus Baru GGAPA pada Anak

Dua kasus di DKI Jakarta.

- Anak berusia 1 tahun, meninggal dunia pada 1 Februari 2023.
- Anak berusia 7 tahun, mengalami demam setelah mengonsumsi obat penurun panas sirup yang dibeli secara mandiri.



Sumber: KPAI/GPA, Bekerjasama dengan M...

menjadi bubur bayi.

"Makanan produk itu, apa pun juga pemanisnya menggunakan sorbitol, produk yang prosesnya bisa gunakan sorbitol itu EG dan DEG itu memang dipergunakan secara luas, jadi memang pasiennya minum

apa saja," pungkasnya.

Interpelasi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mengatakan pihaknya membuka kemungkinan mengambil hak interpelasi terkait munculnya

kembali kasus GGAPA yang memicu kematian anak usia 1 tahun di Jakarta.

Pekan depan, Komisi IX akan memanggil Kepala Badan POM dan mengagendakan tema rapat tentang tindak lanjut penanganan kasus GGAPA.

"Hasil dari rapat itu sangat dimungkinkan kita akan mendorong agar digunakannya hak interpelasi oleh anggota DPR RI, khususnya dari Komisi IX. Menginisiasi hak interpelasi itu agar pemerintah betul-betul bisa bertanggung jawab, jangan kemudian lempar batu sembunyi tangan," ujarnya, kemarin.

Namun, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengatakan belum ada pembahasan soal interpelasi terkait kasus GGAPA. "Siapa yang bilang Komisi IX akan ajukan hak interpelasi? Belum pernah dibahas," kata Irma ketika dihubungi, kemarin.

Sementara itu, mengenai perbedaan data antara Badan POM dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta, Kepala Labkesda DKI Budi Wibowo memastikan telah bekerja sesuai dengan instruksi Kemenkes mendalami kasus GGAPA. "Sesuai dengan arahan dan permintaan Kemenkes terkait pemeriksaan kasus gagal ginjal akut, data hasil labkesda kami berikan kepada Kemenkes," terangnya. (lam/dis/fal/Bob/AT/X-10)